

Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali¹

I Wayan Gede Suacana

Universitas Warmadewa, Denpasar

Email: suacana@gmail.com

Abstract

Balinese culture has a lot of potential values of democracy which up till now still become the basis in the society's life. To explore this potentiality, this study is trying to explain how the manifestation of the normative democratic values and the empirical democracy are implemented in society of Bali. This writing is based on the research which used qualitative method that covered the collection of primary and secondary data, theories of analyzing data, analysis and interpretation of already selected data. Writing and constructing the whole result of this research were also done in this study.

Based on the result of this research, it was found that the manifestation of the normative democratic values show that there were respects for the individual rights, obedience *political fatsoen*, the spirit of cooperation, rotation of the authority and periodical succesion, equality and respect for citizen'rights, tolerance in dessent, transparency and accountabilty of the authority holders, and participation in public policy.

Meanwhile, the empirical manifestation of the democracy which is reflected in many aspects of Balinese life greatly affects how the describe the concept of democracy as the basis of the strength and independence of the transition of the democracy happening nowadays. The application of the values and the parameter of the democracy also influence the form and the characteristic of the relation between Balinese society and the government as part of the institution.

Keywords: local wisdom, democratic values, empirical democracy, Balinese culture

1 Naskah asli dipresentasikan pada Seminar Nasional, "Keunggulan Budaya Bali", Universitas Udayana, Ruang Teater Widya Sabha Fakultas Kedokteran Unud, Denpasar, 11 Januari 2013. Terima kasih kepada I Wayan Ardika dan I Nyoman Darma Putra atas pemberian kesempatan seminar dan menulis dalam jurnal ilmiah.

Abstrak

Budaya Bali memiliki banyak potensi nilai demokrasi yang sampai sekarang tetap menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali. Untuk mendalami potensi itu, kajian berikut berupaya menjelaskan bagaimana manifestasi nilai-nilai demokrasi normatif dan demokrasi empiris diterapkan di Bali. Kajian ini dilandasi penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, teori analisis data, analisis dan interpretasi terhadap data terpilih, dan pendokumentasian serta penyusunan hasil akhir.

Berkat penelitian ini, jelaslah bahwa manifestasi nilai-nilai demokrasi normatif menunjukkan bahwa ada penghormatan terhadap hak individu, kepatuhan terhadap fatsoen politik (kepatutan politik dan keadilan), semangat kerjasama, rotasi kekuasaan dan suksesi periodik, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak warga negara, toleransi dalam perbedaan pendapat, transparansi dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, dan partisipasi dalam kebijakan publik.

Sementara itu, manifestasi empiris demokrasi yang tercermin dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Bali sangat mempengaruhi penggambaran konsep demokrasi sebagai dasar kekuatan dan kemandirian transisi menuju demokrasi saat ini. Penerapan nilai dan parameter demokrasi juga mempengaruhi bentuk dan ciri hubungan antara masyarakat Bali dan pemerintah sebagai bagian dari pelembagaannya.

Kata kunci: kearifan lokal, nilai-nilai demokrasi, demokrasi empiris, budaya Bali.

Pendahuluan

Kebudayaan Bali menyimpan banyak potensi nilai-nilai demokrasi yang hingga kini masih dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu yang merupakan lapisan pertama yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling substantif dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian diikuti dengan lapisan yang lebih konkrit yaitu norma dan hukum (Koentjaraningrat, 1987:11-12), akan banyak menentukan corak kehidupan demokrasi masyarakat.

Manifestasi empirik dari nilai-nilai demokrasi itu terlihat ketika pelaksanaan upacara khusus *Pemarisuda Karipubaya* yang bermakna penyucian alam semesta pascatragedi bom Bali 2002

yang dipercayai telah mencemari dan mengganggu keseimbangan *bhuwana agung* (makrokosmos) dan *bhuwana alit* (mikrokosmos) alam Bali. Pascatragedi, masyarakat Bali menahan diri dan tidak melakukan tindakan ‘balas dendam’ dengan kekerasan. Mereka justru menempuh pendekatan spiritual tersebut yang secara simbolik mengandung pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi yang menembus batas-batas ras, negara, etnik, agama dan telah mendapat empati dan simpati masyarakat lokal, nasional, dan dunia (Geriya, 2003: 1). Nilai-nilai demokrasi itu merupakan modal sosial, modal religius-kultural, modal rohaniah-batiniah bagi pengembangan kebudayaan Bali masa mendatang.

Prinsip-prinsip demikian sejalan dengan konsep ‘tirtha’ yang dikemukakan oleh Kautilya (2003:229), yaitu dorongan hati untuk mengangkat kondisi masyarakat yang plural menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, berdasarkan integritas dan semangat kebersamaan. Dengan menerapkan konsep itu, pembelaan terhadap masyarakat bisa dilakukan dan mengantarkannya pada pengejawantahan kekuatan hidup yang dinamis. Penerapan prinsip seperti itu, sejalan dengan sifat dan karakter manusia Bali yang dominan seperti terbuka, ramah dan luwes, jujur, kreatif dan estetis, kolektif, kosmologis, religius, dan moderat (Naya Sujana, 1994:49-50). Masyarakat Bali dicitrakan sebagai masyarakat yang lebih berminat pada seni, budaya dan agama yang oleh Miguel Covarrubias (1930) digambarkan sebagai daerah yang harmonis, eksotis dan apolitis.

Namun, di sisi yang berbeda masyarakat Bali juga memiliki sejarah kelam berupa ketegangan dan konflik sosial yang besar dalam kehidupan politiknya, yakni ketika terjadi peristiwa G30S tahun 1965 (Robinson, 2006). Kekerasan politik maupun sosial sudah terjadi sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Bali. Hal ini bisa dibuktikan dari berbagai catatan sejarah kerajaan di Bali yang terdapat dalam *Babad*. Raja saling bersaing untuk merebut kekuasaan dengan pertikaian politik dan intrik kekuasaan. Secara garis besar, konflik yang terjadi dalam

masyarakat Bali meliputi konflik antarkasta, politik, penguasa, wilayah, dan ekonomi (Zuhro, 2009).

Varian dalam dinamika kehidupan sosial itu mencerminkan dualisme wajah demokrasi dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di satu sisi, wajah Bali adalah wilayah apolitis di mana masyarakatnya lebih memfokuskan kehidupan pada ranah budaya, agama, dan adat. Namun, di sisi yang lain Bali juga merupakan wilayah politis karena sejarah kekerasan politik yang panjang serta Bali sebagai daerah perebutan konstelasi politik pemerintah pusat. Dalam kondisi seperti itu, penelitian terhadap nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali menjadi sangat menarik dan penting.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Tahap pertama, dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Tahap kedua, memilih teori untuk mengkaji data. Tahap ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahap keempat, melakukan penulisan dan konstruksi dari seluruh hasil penelitian.

Nilai dan Parameter Demokrasi

Pemahaman terhadap demokrasi biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, misalnya dalam arti harfiah lewat ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Sedangkan makna demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis yang disebut juga demokrasi prosedural (*procedural democracy*), melihat demokrasi senyatanya, yaitu bagaimana nilai-nilai ideal itu dijalankan (Gaffar, 2004: 3-10).

Bagian pertama hasil penelitian ini, menjelaskan demokrasi dari sudut pandang yang pertama, dan pada bagian selanjutnya dari sudut pandang yang kedua, sehingga keseluruhan nilai-

nilai dan pengalaman sosial budaya yang membentuk pola ciri tingkah laku demokrasi masyarakat sebagai bagian dari budaya demokrasi (Plano, 1989: 53, 166-167) akan bisa diungkapkan. Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan budaya tidak terlepas dari kedudukan dilematis seperti yang diungkapkan Dahl, yaitu antara otonomi di satu pihak dan kontrol di pihak yang lain (Pelly, 1993:209). Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan kiranya dapat dilihat melalui kerangka unsur/ isi kebudayaan seperti yang diajukan oleh Koentjaraningrat (1987:2) yaitu 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 5) kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup, serta 7) sistem teknologi dan peralatan.

Berbagai parameter yang menandakan nilai-nilai demokrasi tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat (Zuhro, 2009; Gaffar, 2004; Sorensen, 2003; Macridis dan Brown, 1977) yang erat kaitannya dengan keunggulan kebudayaan Bali adalah (1) Penghargaan terhadap hak-hak individu (kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama); (2) mengindahkan tata krama (*fatsoen*) politik; (3) semangat kerja sama; (4) Adanya rotasi kekuasaan dan pergantian pemimpin secara berkala; (5) Kesetaraan dan penghargaan atas hak-hak warga; (6) Toleransi dalam perbedaan pendapat; (7) Transparansi dan akuntabilitas pemegang kekuasaan; dan 8) Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Nilai-nilai demokrasi dalam tulisan ini hanya difokuskan pada ranah tiga unsur/ isi kebudayaan yang pertama, yaitu: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, serta (3) sistem pengetahuan. Uraian beberapa parameter yang mencerminkan nilai-nilai dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Bali itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penghargaan terhadap Hak-hak Individu

- a. Adanya persamaan hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan (sistem pengetahuan).

Seseorang wajib menuntut pengetahuan dan keutamaan/*taki takining sewaka guna widya* seperti tersurat dalam *Kakawin Nitisastra* V:1. Setiap orang diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada yang bodoh, memajukan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk atau *vairagya* (Titib, 1996:429). Pendidikan adalah perwujudan kesempurnaan yang telah ada pada manusia yang tujuan akhirnya adalah membentuk karakter (Sadia, 1988:17).

Dalam praktiknya, ketika Bali masih berada di bawah penjajahan Belanda, kaum *triwangsa* memperoleh prioritas pendidikan. Kondisi ini ternyata mendapat tentangan dari kaum *sudraya* yang menentang hak yang sama sehingga sempat menimbulkan konflik saat itu (Zuhro, 2009:203). Di samping itu, salah satu dari tujuh dosa sosial yang menurut Mahatma Gandhi cenderung dilakukan dalam kehidupan masyarakat modern, tidak terkecuali di Bali, adalah penyelenggaraan sistem pendidikan tanpa disertai pengembangan karakter (*education without character*).

Pendidikan demikian hanya diarahkan pada tujuan kecerdasan intelektual guna menopang hidup siswa kelak, dengan mengabaikan fungsinya yang lain, yakni sebagai upaya mengembangkan kesadaran spiritual ke arah *atma jnana*. Fisikawan kontemporer, Fritjof Capra menyatakan di antara kedua fungsi pendidikan itu idealnya terdapat hubungan paralel, dimana kecerdasan intelektual “supra-rasional” dan kesadaran spiritual “supra-religius” bisa disandingkan pada puncak-puncak pencapaian kreativitas manusia.

- b. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang tanpa membedakan kelas, ras dan agama (sistem religi dan upacara keagamaan serta sistem dan organisasi kemasyarakatan)

Masyarakat Bali bisa menerima dan menghargai pendatang yang berlainan etnis dan agama. Ajaran *Tat Twam Asi* menekankan pada toleransi tanpa menonjolkan perbedaan. Di samping itu,

dalam *Tat Twam Asi* juga terkandung nilai solidaritas yang tinggi serta toleransi yang menimbulkan rasa persaudaraan dan kerukunan hidup antar sesama manusia dan mewarnai tata susila masyarakat Bali, seperti: *Tresna Asih*, *Anresangsia*, *Catur Paramitha*, *Tri Kaya Parisudha*, dan *Yadnya* (Setia, 1993: 58-59, 149). Dengan demikian, hakikat *Tat Twam Asi* pada akhirnya bermuara dari kasih sayang yang diaktualisasikan ke dalam bentuk sikap egaliter yang memandang segala makhluk adalah sama. Sikap egaliter ini pula dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dirumuskan dan dikemas ke dalam konsep “musyawarah-mufakat” sebagai inti dari Demokrasi Pancasila.

Dalam *Nitisastra* V. 2 dinyatakan bahwa setiap orang di dunia ini mempunyai kewajiban saling menghormati terhadap sesamanya. Orang suci apalagi tamu wajib dihormati termasuk orang tua. Citra harmoni, apolitis dan damai dalam berdemokrasi ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan penghargaan atas hak-hak warga dan toleransi dalam perbedaan pendapat, agama dan suku sering dituangkan dalam ajaran *rwa bhineda*. Konsep ini memberikan pengakuan terhadap pluralisme, tiada dua hal yang sama di alam ini seperti diungkapkan pepatah dalam Bahasa Bali “*celebingkah baten biu, don sente don plendo*” (*gumi linggah ajak liu ada kene ada keto*) serta *bhinneka tunggal ika tan hana dharmam anggruwa*. Untuk penegakkan serta kesetaraan dalam bidang hukum adat dikenal istilah *tri danda* (tiga sanksi adat) yaitu *arta danda* (denda dalam wujud materi), *sangaskara danda* (sanksi dalam bentuk upacara tertentu) dan *jiwa danda* atau *atma danda* yang pada zaman dulu berupa hukuman mati, sekarang berupa *pangaksamal ngidih pelih* atau menyampaikan permintaan maaf di hadapan paruman atau rapat desa (Windia, 2004:29-31). Namun, seiring dengan itu juga terjadi berbagai tindakan yang cenderung menjadi eksklusif, intoleran seperti penertiban penduduk pendatang pasca Bom Bali beberapa waktu lalu dan restorasi tradisi politik Bali yang dipelopori oleh kelompok media *Bali Post* dengan mengusung gerakan Ajeg Bali (Zuhro, 2009:216).

2) Mengindahkan Etika Politik (Sistem Kemasyarakatan)

Etika atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik, dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi, kalau politik sudah mengarah pada kepentingan yang sangat pribadi dan golongan tertentu, itu politik yang tak beretika. Etika politik bisa berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ini merupakan prasyarat mendasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas.

Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Rakyat hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat rakyat terajari agar menerapkan orientasi hidup serba instan melalui berbagai bentuk simulakrum politik lewat kegiatan yang disebut *simakrama* atau *dharma swaka*. Batas antara kebenaran dan kewajaran dikaburkan oleh keinginan dan kepentingan politik yang tak terbatas.

Ada nilai-nilai demokrasi berupa ajaran moral yang tetap melekat dalam kepribadian masyarakat Bali, yakni *de koh ngomong* (nilai penguasaan diri dalam berbicara/bahasa), *de ngaden awak bisa* (nilai kontrol penonjolan diri), dan *de ngulurin indriya* (nilai pengendalian ambisi berkuasa).

Nilai-nilai demokrasi dan etika politik dalam Sistem Keyakinan Agama yang bisa dijadikan pegangan oleh

pemimpin dalam melakukan pelayanan (*sewa*) terhadap masyarakat, antara lain 1) *Sathya*, yakni Memegang teguh kebenaran dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. 2) *Dharma*, yakni menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. 3) *Shanti*, yaitu menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. 4) *Prema*, yaitu memupuk cinta kasih murni tanpa ego. 5) *Ahimsa*, yakni pantang menggunakan cara-cara kekerasan (Sadia, 1988).

Nilai-nilai itu harus dipegang agar menjadi pemimpin yang baik, yang mampu memadukan karakter individu (pribadi) dan karakter nasional. Dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”, pemimpin sejati semestinya mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negara.

3) Semangat Kerja Sama (Sistem Kemasyarakatan)

Masyarakat Indonesia menganut konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. Konsep ini bisa disebut nilai gotong royong, mempunyai ruang lingkup yang amat luas karena hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukan dalam rangka kerja sama dengan orang lain (Koentjaraningrat, 1987:11). Kerja sama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional di Bali diantaranya dilakukan dengan *matembung* yaitu melakukan suatu perbuatan yang mengandung arti saling membantu satu sama lain berdasarkan atas kepatutan (Windia, 2004:258). Dalam berbagai ungkapan juga tercermin bagaimana nilai-nilai kerbersamaan, kerja sama, gotong-royong itu dijunjung tinggi, seperti tercermin dalam konsepsi *sagilik saguluk, salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, beriuk saguluk*. Konsepsi ini mengandung nilai solidaritas yang tinggi dalam suka

dan duka, baik dan buruk ditanggung bersama, atau bersama-sama dalam kegiatan baik suka maupun duka (Titib, 2012).

4) Adanya Rotasi Kekuasaan dan Pergantian Pemimpin secara Berkala (Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan)

Rotasi kekuasaan di desa-desa pegunungan atau Bali Aga yang menganut sistem *ulu-apad* berlangsung secara alami di mana terjadi perpindahan atau meningkatnya jabatan seseorang anggota *krama desa* yang sekaligus berarti bergesernya kedudukan anggota tersebut. Misalnya, dari *pangluduhan* meningkat menduduki jabatan *tambalapu* dan seterusnya sampai kedudukan yang paling atas. Sedangkan dalam masyarakat di desa dataran sudah melalui sebuah sistem pemilihan dalam sebuah *pasangkepan/ paruman desa* atau rapat yang biasanya dilakukan secara reguler dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun kecuali ada hal-hal lain, yang menyebabkan rotasi kekuasaan lewat pemilihan bisa dilakukan lebih cepat dari itu.

Ada dua cara terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu: Pertama, rotasi kekuasaan yang terjadi bila terdapat salah seorang dari anggota krama desa melepaskan keanggotaannya, karena tidak lagi mampu memenuhi ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa pakraman yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh anggota *krama desa* yang berada persis di bawahnya dan beralih ke atas satu tingkat. Kondisi ini kemudian diikuti oleh bergesernya semua anggota krama desa yang berada di bawah anggota yang naik tingkat tadi.

Kedua, rotasi kekuasaan dalam pemerintahan desa pakraman yang rutin dilaksanakan setiap bulan sekali, yakni pada *pesangkepan pati panten* untuk mengangkat seorang *penyarikan* dan empat orang *saya*. Sedangkan di desa Apanage atau dataran, rotasi kekuasaan didasarkan pada habisnya masa jabatan para prajuru sehingga diadakan pergantian jabatan tersebut, misalnya setelah kurun waktu lima tahun.

5) Kesetaraan dan Penghargaan atas Hak-hak Warga (Sistem Kemasyarakatan)

- a. Jaminan atas masyarakat yang majemuk (etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial) dan pengakuan status kelompok-kelompok minoritas/ termarginalisasi

Ajaran *Tat tvam asi* dan *Vasudhaiva Kutumbakam* juga mengandung nilai yang memandang setiap makhluk hakekatnya sama, karena ada atma yang menghidupkan setiap makhluk dan memahami bahwa semua makhluk adalah bersaudara, bagaikan sebuah keluarga sehingga semestinya ada kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang.

Di masa kerajaan dan pemerintahan kolonial dahulu, status sosial dan pekerjaan ditentukan oleh kasta. Pemimpin berasal dari kasta ksatria. Setelah kemerdekaan, kasta tidak lagi tegas. Pekerjaan dan strata ekonomi bervariasi, tidak tergantung kasta. Misalnya, seorang yang bergelar *gusti* (dari kasta *ksatria*) bisa menjadi *bellboy* di sebuah hotel, sementara yang berkasta *sudra* bisa menjadi atasannya. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan (desa adat, *banjar*) masih sangat terbatas. Tidak ada ketua adat perempuan, meskipun ada organisasi khusus perempuan, yaitu *krama istri*. Namun, dalam penyelenggaraan upacara adat, perempuan memegang peranan yang penting.

Pada tahun 1960-an, perempuan mulai berpartisipasi dalam organisasi politik seperti Gerwani. Era Orde Baru, peran perempuan kembali terbatas karena trauma politik pasca-G30S 1965. Peran politik perempuan kembali terbuka setelah Reformasi (Putra, 2007). Gerakan emansipasi perempuan menguat, terbukti perempuan Bali sudah duduk sebagai anggota DPD, DPRD atau bupati.

6) Toleransi dalam Perbedaan Pendapat (Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan)

Setiap orang mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan dengan mengedepankan



Foto 1. Warga Bali menyuarakan haknya dalam Pemilu (Foto: Iwan D.)

penerimaan tanpa diskriminasi, serta menghindari persaingan yang dapat memicu konflik politik. Hymne terakhir kitab *Rg Veda X*, 191, 2-4 mengisyaratkan pentingnya rasa kebersamaan. *Sam gacchadhvam, sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam*. Hendaknya bersatu padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan bersama. Ungkapan *paras paros* menganjurkan untuk saling memberi dan menerima pendapat orang lain.

Dalam rangka bermusyawarah dan mufakat, desa-desa pakraman di Bali memiliki *sabha desa* yaitu satu lembaga yang bertugas khusus untuk menyiapkan berbagai program yang harus dilaksanakan oleh desa pakraman yang bersangkutan dalam sebuah *paruman*/ rapat atau pertemuan desa (Windia, 2004:7-8, 165). Warga memiliki hak dipilih dan memilih, khususnya dalam struktur pemerintahan desa. Pemimpin umumnya dipilih secara mufakat. Calon pemimpin diajukan oleh warga dan pada mulanya tidak mengajukan diri. Seiring dengan perkembangan kini warga yang berminat jadi pemimpin bisa mengajukan diri. Keputusan pun bisa diambil melalui pemungutan suara (*voting*).

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di sebuah *paruman* desa, diharapkan pendapat tetap dikemukakan dengan cara

sopan dengan menggunakan bahasa Bali halus. Bila ada salah satu pihak yang emosional, sehingga sulit mengendalikan diri, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, seperti memisuh, mencaci maka orang ini bisa dikenakan sanksi *danda pacamil* (denda karena melakukan kesalahan saat berbicara) bentuknya bisa uang atau juga upacara tertentu (Windia, 2004:33-34). Dengan demikian, konsepsi *merakpak danyuh*, berbeda pendapat tanpa menghilangkan persahabatan (Suastika, 2005) perlu terus dijadikan pegangan.

7) Transparansi dan Akuntabilitas Pemimpin/ Pemegang Kekuasaan (Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan)

a. Ada kode etik dalam pelaksanaan pelayanan publik

Konsepsi *Karmaphala* mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan (Titib, 2012), tidak terkecuali pelayanan publik.

Dalam Kitab *Dharma Vahini* ditegaskan bahwa tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi sebagai *Sevaka Dharma* berarti menerapkan kebajikan dan integritas tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Bahkan ajaran *Manava Seva-Madava Seva* menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada sesama itu pada hakikatnya juga adalah pelayanan kepada Tuhan.

Dalam *Kakawin Nitisastra* (Sargah XIII:9 Wirama Sardulavikridita) dinyatakan:

*Ring wwang wastung iweh hinuttama, hanĕ dehanya nityaneneb,
sangĕng lobhanikangalap guna, muwah ring harsa tan kagraha,
yekangde hilanging sakawruhika, ring purwatemah wigraha,
nda tan kagraha rakwa teki, wekasan sirnabalik nirguna.*

Pangkal kesulitan terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Pemimpin dan pemegang kekuasaan semestinya membatasi keinginan karena nafsu loba dan pengingkaran pada integritas menyebabkan orang berlaku hina sehingga tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakan. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama lalu hilang. Kemudian tidak dapat dicari, sehingga akhirnya habis tanpa meninggalkan bekas.

b. Adanya sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang

Di dalam ajaran Hindu di Bali, korupsi merupakan perilaku yang melanggar ajaran *dharma* terutama penerapan ajaran hidup *Prweriti Marga* yakni pelanggaran *Catur Purusa Artha*, *Karma Phala* dan pelanggaran terhadap hukum Hindu dan adat Bali. Dalam kearifan lokal di Bali, korupsi disebutkan sebagai sebuah tindakan pelanggaran hukum dan pelakunya disebut *maling metimpuh*, *ngutil*, *bedak suginin*, *metopong kuskusan*, *imba solahе sekadi raksasa*, demikian juga disebut sebagai *nastika*, *duracara*, *dusmati*, *duratman*, *silabramsanam*, *dursila*, *durbudi*, semua tindakan tersebut disebut *asubhakarma* (perbuatan buruk)

Dalam hukum Hindu yang berlaku di Bali korupsi merupakan tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan *Asta Corah* dan *Asta Dusta* (delapan macam kejahatan yang dilakukan bersama sama). *Steya* (hukum tentang pencurian uang negara), *Aswamiwikraya* (penjualan barang tak bertuan) dan *Samwidwyatikarma* (hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan). Semua perilaku korupsi merupakan pelanggaran ajaran agama dan pelanggaran hukum formal (UU RI No. 3, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukum agama Hindu, dan hukum adat Bali (Sudiana, 2010).

- Jaminan atas akuntabilitas pejabat publik.

Kitab *Bharata Yudha* yang diyakini oleh masyarakat Bali mengajarkan, “Hanya orang berkarakter teguh, berintegritas dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan

bersih". Hal itu berarti untuk menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berkarakter, berintegritas serta bijaksana. Di samping itu juga terdapat tuntunan harmoni (keselarasan) agar pemimpin mampu bertindak adil dan akuntabel. *Weda Smerti* VII.32 menegaskan: pemimpin dan pejabat publik semestinya berlaku adil di lingkungan kerjanya, mengendalikan lawan-lawan yang kuat dan tidak mendua terhadap teman serta tidak berlaku keras terhadap brahmana. Untuk menjamin akuntabilitas pejabat publik, ada semacam pengadilan di beberapa desa pakraman di Bali yang dikenal dengan *kertha sabha*. Lembaga ini dibentuk untuk meringankan tugas-tugas bendesa adat, khususnya yang berhubungan dengan kasus-kasus adat yang muncul di desa (Windia, 2004:9-10).

8) Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik (Sistem

a. Jaminan atas eksistensi masyarakat sipil

Ada empat aspek yang berperan dalam dinamika masyarakat sipil di Bali, yaitu pasar, *pura*, *puri* dan perpustakaan. Pusatnya dulu ada di *puri*, tetapi kini sudah bergeser dengan munculnya pasar sebagai pemilik modal (Zuhro, 2009:). Sudah ada lembaga-lembaga masyarakat sipil sebagai perwujudan institusi demokrasi lokal yang menjadi wadah bagi masyarakat sipil di Bali. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Pakraman (MDP). Kedua lembaga ini umumnya menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama dan adat. PHDI umumnya memberikan saran-saran dan konsultasi, sedangkan MDP banyak memfasilitasi konflik-konflik adat yang terjadi. Namun, MDP dinilai masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi pemikiran pejabat maupun masyarakat di Bali. Salah satu contohnya adalah Harian *Bali Post* yang mengeluarkan dan memasyarakatkan konsep serta wacana "Ajeg Bali".

b. Jaminan atas partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan

Sudah kurang lebih tiga puluh tahun terakhir ini, dalam masyarakat Bali muncul sindrom *political taboo* atau tabu politik. Dalam sindrom ini, politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor, perlu dihindari, cermin kelicikan, amoral, penuh darah dan kekerasan. Sindrom tabu politik ini tidak hanya menjangkiti birokrasi pemerintahan, tetapi juga masuk ke ruang kesadaran berbagai segmentasi sosial masyarakat Bali, mulai dari akademisi, agamawan, pengamat, aktivis NGO, pengusaha sampai dengan *prajuru* (pengurus desa adat) maupun *krama* (warga) desa adat (Dwipayana dalam Darma Putra, 2004:58). Nilai-nilai yang ditanamkan adalah politik dan adat tidak dapat disatukan. Masyarakat dijauhkan dari politik sehingga tidak banyak ikut campur dalam urusan nasional. Namun demikian, ada mekanisme untuk mengutarakan pendapat melalui *paruman* terkait kebijakan atau hal-hal yang bersifat lokal di tingkat desa *pakraman* atau *banjar*. Khusus dalam hubungan dengannya di tingkat daerah, masyarakat pada umumnya akan mengutarakan pendapatnya pada orang yang dihormati di masyarakat dan memercayakannya untuk menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah. Namun, setelah era reformasi, masyarakat sipil memiliki banyak arena dan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya langsung pada pemerintah yang dituju (Zuhro, 2009:244) sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam proses kebijakan publik.

Manifesasi Empiris Demokrasi dalam Masyarakat Bali

Nilai-nilai demokrasi memiliki arti penting bagi demokratisasi dan desentralisasi pada aras lokal yang sedang dikembangkan hingga kini, yakni perubahan dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik (Dwipayana et.al, 2003: v) atau dari sistem “leviathan” ke arah

sistem “liliput” (Piliang, 2005:352).

Dari hasil penelitian diketahui nilai-nilai demokrasi tersebut mempengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjabarkan konsep demokrasi sebagai basis kekuatan dan kemandirian dalam transisi demokrasi sekarang ini. Sementara, penerapan nilai-nilai dan parameter demokrasi itu juga memengaruhi bagaimana bentuk dan sifat relasi antara masyarakat Bali dengan pemerintah sebagai bagian institusi negara. Sebagian di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, sistem pemilihan secara langsung sudah lama diterapkan dalam pergantian jabatan *prajuru* di desa-desa dataran di Bali. Mereka biasanya dipilih dari, oleh dan untuk desa pakraman melalui *paruman/ sangkepan krama* yang secara khusus diadakan untuk itu. Pemilihan *prajuru* biasanya berjalan secara demokratis sesuai aturan yang tertuang dalam *awig-awig desa*. Di desa Bali Aga (pegunungan) kepercayaan terhadap senioritas dan orang yang lebih berpengalaman dalam memangku jabatan *prajuru desa* sangat besar. Budaya demokrasi ini menjadikan *krama desa* di Bali tidak canggung dalam sistem pemilihan umum langsung nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum langsung untuk memilih gubernur dan bupati. Kepercayaan pada senioritas memberikan kecenderungan pilihan *krama desa* pada pemimpin kharismatis daripada yang profesional.

Kedua, perhatian dan keterlibatan *krama desa* dalam ikut mengawasi penggunaan keuangan desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga desa pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah mulai terlihat. Ada hubungan simetris antara kesederhanaan prasyarat untuk menjadi *prajuru desa* dengan kualitas dan kemampuan manajerialnya dalam mengelola sumber-sumber dana desa pakraman. Pada sistem pergiliran di desa pegunungan, sejumlah anggota yang paling senior—dihitung berdasarkan usia perkawinannya—langsung menduduki jabatan *prajuru desa*

secara kolektif, sedangkan di desa dataran yang menggunakan sistem pemilihan kriterianya antara lain: kemampuan baca tulis latin, pengetahuan tentang agama dan adat istiadat setempat, mempunyai kewibawaan, kharisma, dan sebagainya sebagai *primus inter pares* (Pitana, 1994:152). Kesederhanaan persyaratan prajuru dan sistem seleksi yang dilakukan menyebabkan kesulitan dalam mengelola pemerintahan dan manajemen keuangan desa pakraman yang semakin kompleks. Apalagi setelah era reformasi sumber-sumber dana kegiatan desa pakraman jauh lebih luas daripada desa dinas, dibandingkan dengan era sebelumnya.

Ketiga, demokrasi di desa pakraman umumnya sangat bervariasi. Dengan berkembangnya konsep *desa-kala patra* yang bermakna bahwa variasi yang ada memang diakui dan dihargai, sesuai dengan daerah, waktu, dan situasi objektif yang sedang terjadi. Bahkan kemudian 'hak untuk berbeda' dari suatu *desa pakraman* jugadibenarkan dalam tatanan masyarakat Bali, sehingga muncul ungkapan pembenaran yang dikenal dengan istilah *desa mawacara* yang maksudnya hak desa pakraman untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tradisi yang berkembang setempat. Dalam kondisi seperti itu, relasi masyarakat *desa pakraman* dengan institusi pemerintahan desa—di Bali disebut desa dinas--sebagai perpanjangan 'tangan' negara akan selaras apabila didukung oleh asas desentralisasi (pemencaran kewenangan) daripada sentralisasi (kewenangan terpusat) dalam sistem hubungan Pusat dan Daerah. Penerapan sistem sentralisasi dengan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal itu disebabkan karena UU tersebut hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya yang menghendaki penyeragaman bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, padahal pasal 18 UUD 1945 mengakui keanekaragaman adat yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya. Dengan kata lain, UU itu telah gagal membina budaya demokrasi masyarakat desa pakraman, karena kuatnya intervensi negara lewat pengaturan yang serba seragam

pada struktur, sistem pemerintahan dan demokrasi di desa.

Keempat, nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali telah mewariskan segi-segi berpikir positif yang patut ditumbuhkembangkan dalam penguatan kehidupan demokrasi di Bali, maupun Indonesia nantinya. Beberapa diantaranya: *tatas, tetes* (kehati-hatian dalam bertindak); *tat twam asi* (toleransi tanpa menonjolkan perbedaan); *paras paros* (saling memberi dan menerima pendapat orang lain); *salunglung sabhayantaka* (bersatu teguh bercerai runtuh); *merakpak danyuh* atau perbedaan pendapat tidak menghilangkan persahabatan (Suastika, 2005:16-18). Di samping itu juga ada Ajaran *Tat twam asi* dan *Vasudhaiva Kutumbakam* juga mengandung nilai yang memandang setiap makhluk hakekatnya sama, sehingga semestinya ada kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang. Konsepsi *Desa, Kala, dan Patra* memberikan batasan ruang, waktu manusia yang berintikan penyesuaian atau keselarasan serta dapat menerima perbedaan dan persatuan sesuai dengan motto *Bhineka Tunggal Ika*. Konsepsi ini memberikan landasan yang luwes dalam komunikasi ke dalam maupun ke luar, sepanjang tidak menyimpang dari esensinya. Konsepsi *Karmaphala* mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik dan demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan. Sementara, konsepsi *Salunglung Sabhayantaka, Paras Parosarpanaya*, atau *Beriuksaguluk* mengandung nilai solidaritas yang tinggi dalam suka dan duka, baik dan buruk ditanggung bersama. Bersama-sama dalam kegiatan baik suka maupun kedukaan (Titib, 2012). Nilai-nilai demokrasi itu merupakan warisan yang telah teruji dalam sejarah dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat di Bali. Di samping itu, upaya pengembangannya juga mengandung aspek pelestarian nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) yang sangat

penting bagi perjuangan untuk mewujudkan sistem demokrasi Indonesia modern dengan tetap berpijak pada keunggulan kebudayaan daerah.

Kelima, ada beberapa prinsip moral yang dijadikan acuan dalam kehidupan berdemokrasi di Bali. Masyarakat Bali jarang mengidentikkan aktivitas berpolitik dan berdemokrasi sebagai wilayah pragmatisme dan oportunistik yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Apalagi, dengan menerapkan konsep Machiavellian yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, sesuatu yang kerap dipraktikkan oleh kalangan politisi pragmatis daerah maupun nasional. Namun, dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”, pemimpin sejati akan bisa mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negaranya (Jendra dan Maswinara, 2001). Dengan begitu kehidupan berdemokrasi dan politik tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu lagi tetapi justru sebagai satu cara untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup masyarakat (*jagaditha*).

Keenam, ada lima nilai utama bagi pemimpin dalam melakukan pelayanan (*sewa*) terhadap masyarakat, yaitu: (1) *Sathya*, memegang teguh kebenaran dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktikkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan suku, etnis, ideologi bahkan keyakinan agama. (2) *Dharma*, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. *Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam*. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi

demi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. (3) *Shanti*, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari *Sat*, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan "*madhura-ananda*" atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat. (4) *Prema*, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasi diri dengan golongan lain dalam satu kesatuan. Pemimpin yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan rakyat yang sebenar-benarnya, dan (5) *Ahimsa*, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan pihak yang dianggap berbeda pandangan, tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, pemimpin dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan dengan mengedepankan penerimaan tanpa diskriminasi, serta menghindari persaingan yang memicu konflik politik. Hymne terakhir kitab Rg Veda telah mengisyaratkan pentingnya rasa kebersamaan itu. *Sam gacchadhvam, sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam*. Berkumpulilah, berdiskusilah bersama, buatlah pikiran kita bersatu padu.

Ketujuh, nilai-nilai demokrasi yang ada semestinya dijadikan acuan bagi upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keselarasan antar sesama *krama* (warga Bali) maupun *krama tamiu* (penduduk pendatang). Hal ini merupakan prasyarat penting bagi pencegahan kemungkinan timbulnya konflik horizontal di Bali, maupun dalam membina kehidupan

masyarakat yang majemuk. Apalagi dalam kondisi masyarakat Bali yang pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya relatif tinggi sangat mungkin terjadi konflik karena ketidaksetaraan dipersepsikan sebagai ketidakadilan.

Kedelapan, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Bali masih menghadapi sejumlah persoalan. Instrumen demokrasi yang digunakan justru bisa menimbulkan persoalan demokratisasi baru yang mengarah pada penguatan kembali institusi dan aktor politik masa lalu yang tidak demokratis (feodalisme atau oligarkis). Penerapan *indigenisme* juga bisa memancing rasisme yang anti pluralisme maupun multikulturalisme (Dwipayana, 2003: 355). Pluralisme menjadi landasan ideal kehidupan masyarakat untuk membawa semua ekspresi kebudayaan, termasuk budaya demokrasi masyarakat ke dalam struktur yang seimbang dimana praktik penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah 'eksklusivitas' yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun religius (Setyaningrum, 2004: 303).

Dengan berpegang pada pluralisme, nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali tidak sekadar mengajarkan, "mengenal, menghargai dan menyambut perbedaan", yang sering dianggap sebagai slogan klise yang statis. Tetapi, yang terpenting semua komponen masyarakat dengan keberagaman yang ada menjadi ikut "terlibat, mempertanyakan dan mempelajari" satu sama lain, sehingga mampu menangkap sifat dinamis dan sinergis dalam interaksi masyarakat yang heterogen (Fay, 2002). Kondisi ini mendekati konsepsi ideal masyarakat *heteronomi* (otonomi dialogis) menurut Piliang (2005), serta konsep *tirtha* dari Kautilya (2003). Keduanya memberikan hak hidup secara adil berbagai unsur budaya yang plural, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural dengan berdasarkan prinsip-prinsip semangat penghargaan terhadap nilai heterogenitas-inklusif, dekonstruksi yang rekonstruktif, prinsip dialogis, prinsip lintas budaya, pluralisme-dinamis, inklusivisme, pertukaran mutual,

toleransi dan keterbukaan yang kritis.

Penutup

Nilai-nilai demokrasi seperti yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bali merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi modern, khususnya demokrasi empirik/ prosedural. Berbagai parameter yang menandakan nilai-nilai demokrasi tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan keunggulan kebudayaan Bali adalah (1) Penghargaan terhadap hak-hak individu (kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama); (2) mengindahkan tata krama (*fatsoen*) politik; (3) semangat kerja sama; (4) Adanya rotasi kekuasaan dan pergantian pemimpin secara berkala; (5) Kesetaraan dan penghargaan atas hak-hak warga; (6) Toleransi dalam perbedaan pendapat; (7) Transparansi dan akuntabilitas pemegang kekuasaan; dan (8) Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Nilai-nilai demokrasi yang dianut akan memengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjabarkan konsep demokrasi sebagai basis kekuatan dan kemandiriannya dalam transisi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

Beberapa manifestasi empirik nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali adalah sebagai berikut.

Pertama, tradisi sistem pemilihan secara langsung dalam pergantian jabatan *prajuru* di desa dataran dan kepercayaan terhadap senioritas dan orang yang lebih berpengalaman dalam memangku jabatan *prajuru desa* di desa pegunungan.

Kedua, perhatian dan keterlibatan *krama desa* dalam pengawasan keuangan desa, serta keinginan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga desa pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiga, demokrasi di desa pakraman pada umumnya sangat bervariasi, sehingga lebih tepat diterapkan desentralisasi daripada sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat desa juga telah mewariskan segi-segi berpikir positif yang patut dikembangkan dalam penguatan kehidupan demokrasi modern.

Kelima, prinsip-prinsip moralitas selalu dijadikan acuan dalam kehidupan demokrasi. *Krama desa pakraman* tidak pernah mengidentikkan aktivitas berpolitik dan berdemokrasi sebagai wilayah pragmatisme dan oportunistik yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Keenam, untuk membina kehidupan demokrasi yang harmonis, diperlukan lima nilai utama bagi pemimpin sebagai persiapan melakukan pelayanan (*sewa*) tertinggi bagi masyarakat dan negara, yaitu dengan tetap berpegang pada: kebenaran (*sathya*), kebajikan (*dharma*), kedamaian (*shanti*), kasih sayang (*prema*) dan tanpa kekerasan (*ahimsa*).

Ketujuh, keragaman praktik demokrasi semestinya diarahkan pada upaya menciptakan kesetaraan dan keselarasan antar sesama *krama desa* maupun *krama tamiu*. Hal ini merupakan prasyarat penting bagi pencegahan kemungkinan timbulnya konflik horizontal di Bali, maupun dalam membina kehidupan masyarakat majemuk yang tidak selamanya kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi.

Beberapa nilai demokrasi tersebut bisa jadi hanya sebagian dari sekian banyak unsur eksternal penting yang juga harus ada apabila demokrasi ingin ditegakkan. Nilai-nilai demokrasi itu saja tidak cukup untuk menghasilkan sistem politik demokratis tanpa disertai dengan situasi dan kondisi serta institusi politik yang mendukung. Penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam beberapa kasus masih menuai persoalan, seperti penguatan kembali institusi dan aktor politik masa lalu yang tidak demokratis (feodalisme atau oligarkis). Begitu pula penerapan *indigenisme* akan bisa memancing rasisme yang anti pluralisme. Nilai kebebasan dan kesamaan (*equality*) sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi juga terhambat dalam budaya

politik lokal di Bali karena budaya paternalistik yang masih membatasi kebebasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan dan I Nyoman Darma Putra (ed.). 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.
- Covarrubias, Miguel. (Terjemahan Sunaryono Basuki, Ks). 2013. *Pulau Bali Temuan yang Menakjubkan*. Denpasar: Unud Press.
- Dwipayana, Ari. 2003. "Catatan Kritis Pelaksanaan Otonomi Tingkat Desa di Bali" dalam Karim, Abdul Gaffar, (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Fay, Brian, 2002. M. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geriya, I Wayan. 2003. "Potensi Konflik dan mediasi Konflik Dampak Tragedi Bom Kuta, Bali", *Laporan Penelitian Baseline Impact Assesment-Sub National of the Bali Bombing*, Kerjasama FE Unud dengan World Bank, UNDP, USAID, Denpasar, 18 Januari 2003
- Kautilya (Canakya). 2003. *Arthasastra*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Macridis, Roy C and Brown, Bernard E. 1977. *Comparative Politics: Notes and Reading*. Illinois: The Dorsey Press.
- Naya Sujana, Nyoman. 1994. "Manusia Bali di Persimpangan Jalan", dalam Pitana, I Gde (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit BP.
- Pelly, Usman. 1993. "Demokrasi dalam Kehidupan Budaya", dalam Effendi, Sofian et al (peny), *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pesantian Sanathana Gita. 1997. *Kakawin Nitisastra dan Putra Sesana*. Mataram: Pesantian Sanathana Gita.
- Piliang, Yasraf A. 2005. *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era*

- Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pitana, I Gde (ed) *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit BP.
- Plano, Jack C. et al . 1982. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Putra, I Nyoman Darma. 2007 (Cet ke-2). *Wanita Bali Tempo Doeloe, Perspektif Masa Kini*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Robinson, Geoffrey. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LkiS.
- Sadia, I Wayan (penerjemah). *Tt. Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan untuk Jaman Baru*. Jakarta: SSS Centre.
- Setia, Putu (ed). 1993. *Suara Kaum Muda Hindu*. Jakarta: Yayasan Dharma Nusantara-FCHI.
- Setyaningrum, 2004. *Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Publik dan Realitas Sosial*, dalam Hiariej, Erick dkk (ed), *Politik Transisi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Penerbit Fisipol UGM.
- Sorensen, G. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suastika, I Made. 2005. “Berpikir Positif dalam Budaya Bali” dalam PaEni, Mukhlis dan Pudentia (ed), 2005, *Bunga Rampai Budaya berpikir Positif Suku-suku Bangsa*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata & Asosiasi Tradisi Lisan.
- Sudiana, I Gusti Ngurah. 2010. *Rancangan Bhisama Sabha Pandita PHDI Pusat tentang Antikuropsi*. Denpasar: PHDI Bali.
- Titib, IM. 1996. *Veda: Sabda Suci Pedoman Prakts Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made. 2012. *Sinergi Agama Hindu dan Budaya Bali*, dalam http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=79&limit=1&limitstart=3 diunduh 12-12-2012.
- Uhlen, Anders. 1995. *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors*. Sweden: Departement of Political Science, Lund University.
- Windia, Wayan P. 2004. *Danda Pacamil: Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Zuhro, R. Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.